

MEMAHAMI PERILAKU APARATUR PEMERINTAH

Oleh : Dra. Dyah Lituhayu M Si

: Deviant behavior recently exhibited by the young government officer or a civil servant, is a interesting phenomenon suatau. Shape deviations are shown proven over the high level of on does, with inidikasi ownership "fat accounts". The above is a halmark of social wealth or of a community or region must be maintained as a form of mutual assistance and friendship. ; if the culture is a lot of negative impacts, should need to be changed. It mainly deals with how ve status and prestige of the government apparatus.

s : wisdom, community, region

PENDAHULUAN

ipun reformasi birokrasi sudah oleh pemerintah Indonesia, namun sampai hari ini belum mencapai hasil mal, terbukti akhir-akhir ini kita sering banyak bermunculan para pejabat para PNS yang melakukan gan-penyimpangan dalam penggunaan banyaknya penemuan para PNS muda unyai "rekening gemuk" diluar bagi mereka yang rata-rata masih ada sekaligus masih menduduki pegawai yang tidak tinggi.

Pelaporan dan Analisis Transaksi tau PPATK mengungkapkan adanya liaran rupiah milik sepuluh pegawai ta (Kompas, 8 Desember uan ini bisa dilihat sebagai fenomena si tidak hanya dilakukan oleh pejabat-ipun pegawai yang mempunyai yang tinggi.

an yang muncul adalah mengapa b-olah sudah menjadi bagian atau agi para aparatur pemerintah ? reka melakukan penyimpangan-1?

pemerintah dalam hal ini adalah upakan bagian dari sistem birokrasi erilaku yang ditunjukkan oleh para gan memiliki "rekening gemuk" mena yang cukup menarik untuk ingat ada ketidak wajaran kening yang cukup fantastis bila engan masa kerja sekaligus sistem ig digunakan bagi PNS. Dalam asalahan di atas tentunya banyak nendorong timbulnya perilaku

tersebut. Salah satunya adalah faktor nilai sosial budaya masyarakat. Pada dasarnya perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh nilai - nilai budaya. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa " kepribadian merupakan hasil dari interaksi antara kebudayaan dengan masyarakat yang mendasari perilaku individu " (2002-,186) yang menunjukkan bahwa perilaku merupakan cerminan dari sistem budaya masyarakat. Oleh karena itu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparatur negara khususnya para PNS muda tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya masyarakat.

Perilaku dari para aparatur pemerintah yang cenderung bersifat negatif ini merupakan suatu bentuk konsekwensi dari status mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Gambaran ini merupakan suatu kewajaran yang menganggap bahwa status menjadi PNS merupakan suatu prestise tersendiri, masyarakat menganggap bahwa menjadi PNS merupakan suatu kebanggaan dan secara ekonomis apabila seorang PNS dalam hal ini bisa dikatakan aparatur negara merupakan orang yang " mapan ". Dengan anggapan ini maka bagi para aparatur negara sendiri bisa merupakan suatu beban, dalam arti tuntutan -- tuntutan kewajaran dari nilai sosial budaya tidak bisa diabaikan.

Gaya hidup para aparatur negara atau bagian dari para birokrat ini jelas merupakan upaya untuk mendukung prestise mereka sebagai pejabat ataupun PNS. Ditengah penderitaan masyarakat ini para aparatur negara dengan tega melakukan hobi yang " mahal " misalnya olah raga golf; belanja barang bermerek dsb .(Budi Setiyono, 2004, 155). Kalau atasan para PNS bisa melakukan ini, tentunya akan mendorong bawahannya untuk melakukan hobi tersebut. Namun demikian kondisi ekonomi tentunya tidak

ARTIKEL

sekuat para pejabat eselon 1 dan 2, oleh karena itu para PNS muda yang belum mempunyai jabatan struktural yang tinggi bisa pula melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan. Siapa yang tidak mengenal kasus Gayus yang menggelapkan uang pajak para pengusaha yang nilainya mencapai puluhan milyar.

Para pegawai muda ini umumnya menduduki golongan III a yang berpotensi dan menduduki tempat-tempat strategis di lembaga pemerintah. Padahal apabila ditinjau secara penggolongan kepegawaian dia masih dalam posisi III a dengan masa kerja yang belum lama (kurang dari 10 th) tentunya gaji pokok yang dia terima hanya berkisar Rp. 2.180.300,- (PP no 11 tahun 2011), sedangkan menurut PP NO 15 tahun 2012 golongan III a dengan masa kerja kurang dari 10 th atau 10 th, gaji pokoknya sebesar Rp. 2.391.202,-. Berdasarkan standar penggajian ini jelas menunjukkan ketidak wajarannya atas kekayaan yang dimiliki para PNS muda. Karena berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Miftha Thoha dalam Administrasi Negara isu-isu kontemporer bahwa 'sistem penggajian yang selama ini dilakukan membuat gaji pegawai dan kesejahteraannya membuat status pegawai negeri tergolong kaum duafa' (2009, 17)

Faktor-faktor yang menyebabkan ataupun yang mendorong perilaku yang menyimpang ini tentunya tidak terlepas dari :

1. Faktor sosial budaya yang menempatkan PNS merupakan status yang mempunyai prestise dan ada kepastian gaji
2. Faktor gaya hidup, para PNS mempunyai standar hidup yang cukup tinggi, misalnya pemilihan jenis oleh raga yang mewah (golf), pemilikan barang mewah.

Faktor sosial budaya ini merupakan suatu bentuk nilai sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja, sebagai misal dengan adanya penilaian masyarakat yang menganggap PNS secara finansial dianggap suatu status "mampu", maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat mereka selalu diundang sekaligus diharapkan hadir.

Bentuk-bentuk kegiatan yang biasaya mengharapkan kehadiran para aparatur pemerintah (sebagai warga masyarakat) antara lain : pesta pernikahan; khitanan; kelahiran, kerja bakti untuk membangun sarana dan prasarana kampung dsb.. Ini merupakan suatu bentuk nilai sosial budaya yang "mengharuskan" setiap warga untuk menghadiri sebagai bentuk dukungan terhadap kebiasaan masyarakat yang merupakan budaya yang menjadi ciri khas dari masyarakat.

Tentunya kebiasaan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya ini memerlukan "ongkos" yang tidak sedikit.

PEMBAHASAN

Pemahaman ongkos disini adalah, untuk menghadiri acara-acara tersebut mau tidak mau memerlukan biaya dalam arti setiap yang hadir akan membawa 'bingkisan ataupun hadiah' yang tentunya tidak sedikit. Apabila seorang PNS yang dianggap oleh masyarakat sebagai status yang cukup tinggi, maka bisa dilihat rata-rata berapa uang yang harus dikeluarkan untuk ongkos kehidupan sosial untuk mendukung eksistensi nilai-nilai budaya ini.

Tidak jarang dalam satu minggu seorang pejabat mendapatkan lebih dari 5 undangan sehingga rata-rata setiap bulannya bisa mendapatkan lebih dari 20 undangan. Dan sebagian besar masyarakat pengundang selalu mengharapkan kehadiran mereka, karena dianggap mempunyai hubungan dengan pejabat yang petinggi. Dan tentu saja ada harapan pemberian hadiah yang diatas rata-rata masyarakat yang nilai 'kepantasan' inilah yang terkadang dan 'pejabat' dipakai sebagai ajang untuk pembungkam sekaligus 'gengsi' mereka di mata masyarakat. Apabila "standar kepantasan" yang cukup sebesar Rp.500.000,- untuk setiap kehadiran beberapa besarnya uang yang harus dikeluarkan 'pejabat' untuk ongkos mendukung nilai-nilai sosial budaya ini? Pemahaman besarnya kepantasan ini bisa kita lihat tatkala menjelang Idul Fitri, dimana banyak pernyataan para kepala daerah yang mengizinkan para pejabat hanya boleh menerima bingkisan lebaran nilainya tidak lebih dari Rp. 500.000,- karena itu menjadi suatu kewajaran apabila pejabat yang datang ke suatu perhelatan 'diharapkan' memberikan hadiah kepantasan. Berdasarkan nilai kepantasan dibuat oleh masyarakat ini berapa biaya yang dikeluarkan setiap bulannya kisaran 10.000.000,- untuk ongkos sosial. Tentukan nilai yang cukup fantastis yang harus dikeluarkan. Dari mana para aparatur pemerintah mencarinya? Sementara kalau mengandalkan standar gaji jelas tidak mencukupi.

Selain jenis nilai-nilai sosial budaya ada lagi hal yang tidak bisa dilepaskan bagi pejabat PNS untuk menyongkong nilai-nilai yang lain. Tradisi gotong royong meramaikan kampung, membangun sarana dan

kampung, bersih desa, peringatan hari kemerdekaan yang secara rutin dilaksanakan sebagai ciri khas masyarakat, jelas akan memerlukan biaya. Biasanya pihak pengurus kampung akan membuat proposal dan menyodorkannya kepada para 'pejabat' untuk tidak dapat ditolak. Apabila melakukan penolakan jelas akan mendapat penilaian negatif dari masyarakat sekaligus akan menurunkan gengsi bagi aparat pemerintah tersebut. Kebiasaan inilah yang kiranya mewarnai kehidupan para aparat pemerintah (PNS).

Ongkos nilai sosial budaya di Indonesia ini cukup tinggi, apabila hal ini diterapkan untuk kehidupan aparat pemerintah secara individual jelas gaya yang didapat sesuai dengan daftar gaji tidak akan cukup. Didukung oleh rasa gengsi para aparat yang dianggap oleh masyarakat sebagai status 'priyayi', maka wajar pula bagi para PNS ini untuk selalu membuktikan bahwa secara ekonomi mereka mampu. Dan untuk mempertahankan ini, maka berbagai upaya dilakukan oleh para aparat pemerintah untuk mendapatkan uang yang lebih guna menyokong kehidupan sosialnya sekaligus untuk menjaga gengsi di depan masyarakat. Stigma yang berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia adalah para pejabat, aparat pemerintah adalah individu yang secara ekonomi memiliki kekayaan yang berlebih, sehingga wajar kalau mereka dianggap orang yang angak mapan dan selalu akan dibebani oleh ongkos nilai-nilai sosial buday dilingkungannya. Gambaran ini akan semakin nyata kalau kita amati, adanya keheranan masyarakat apabila ada seorang pejabat yang menaiki kebdaraan umum ataupun akan di warung kaki lima. Kondisi ini dianggap tidak wajar dan tidak pantas. Disinilah tampak bahwa perlakuan masyarakat terhadap pejabat sangat tinggi dalam arti mereka hanya mempunyai perilaku yang berbeda dengan masyarakat biasa. Ketidak wajar dan ketidak pantasan ini adalah yang membuat masyarakat sendiri. Mengapa tidak pantas? mengapa tidak wajar?

Inilah yang menyebabkan perilaku aparat pemerintah sulit untuk berubah. Masyarakat masih menganggap birokrasi kita adalah birokrasi priyayi, sebagai warisan budaya penjajah. Sikap minta tolong yang bukan melayani (Budi Setiono, 2004: 10). Gambaran ini jelas menunjukkan bahwa perilaku para aparat pemerintah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Aspek lain yang mendorong aparat pemerintah melakukan tindakan penyimpangan adalah gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh

mereka. Kepemilikan mobil mewah; barang-barang produk luar negeri, semua ini digunakan guna menjaga gengsi sekaligus untuk prestise di masyarakat. Semua ini tentu saja memerlukan ongkos yang cukup besar, sehingga kalau aparat pemerintah itu tidak tahan terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat, jelas akan mencari berbagai upaya untuk memenuhinya. Dan cara cepat yang dipakai melakukan korupsi.

Oleh karena itu dalam upaya mengurangi perilaku-perilaku menyinggung para aparat pemerintah aspek hukum saja tidak akan jalan. Akan tetapi dukungan masyarakat yang berkaitan dengan sisitem nilai budaya juga harus dilakukan.

KESIMPULAN

Nilai budaya yang merupakan ciri dari kekayaan atau *social wisdom* suatu masyarakat atau daerah memang harus dipertahankan. Namun demikian apabila nilai-nilai tersebut banyak membawa dampak negatif, sebaiknya perlu dirubah.

Sebab pada prinsipnya nilai budaya atau kebudayaan dalam arti luas mempunyai sifat yang dinamis, sehingga melakukan perubahan merupakan hal yang wajar. Anggapan bahwa jabatan menjadi aparat pemerintah (PNS) sebagai suatu jabatan yang sangat prestis sekaligus memiliki kekayaan yang banyak justru akan mendorong banyaknya penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Prestise yang tinggi bagi aparat pemerintah menyebabkan tuntutan sosial atau ongkos sosial yang harus dibayar atau disumbangkan juga akan sangat tinggi. Padahal apabila menurut standar gaji jelas ongkos ini tidak akan mencukupi. Oleh karena itu untuk mencukupi maka mereka melakukan korupsi.

Daftar Pustaka

- Rosenbloom, David; Kravchuk Robert, Clerkin R. 2009 *Public Administration Understanding management, Politics and Law in The Public Sector*, Mc Graw Hill New York.
- Setiyono Budi, 2004 *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Puskodak FISIP UNDIP Semarang.
- Soekanto Soerjono, 2002 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Thoha Miftah 2008 *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Kencana Jakarta